

Patriarki Dalam Budaya Jawa; Membangun Perilaku Pembungkaman Diri Pada Perempuan Korban Seksual Dalam Kampus

Salma Rabbaniyah¹, Shafa Salsabila²

^{1,2}Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret
salmarbn@student.uns.ac.id¹, shfslsabila@student.uns.ac.id²

Abstract

The patriarchal culture that is rooted in Indonesia, especially in the Javanese, triggers many problems, especially on relations between genders. Gender inequality in patriarchal culture plays a big role in the occurrence of sexual violence in society, including on campus. There are still many cases of sexual violence on campus that are not reported, one of the reasons is because the victims remain silent. This study aimed to examine the influence of patriarchy in Javanese culture on sexual violence victims on campus who choose to silence themselves. This research uses a qualitative descriptive approach with narrative review method by studying and analyzing literature from various scientific articles that are relevant to the research topic. Strong patriarchal culture in society and the trauma experienced by victims plays a big role in causing them to be reluctant to report what they have experienced and choose to silence themselves. Thus, these findings suggest that self-silencing is carried by victims to maintain interpersonal relationships, avoid conflict, and maintain physical and or psychological safety as a way of protecting oneself in a patriarchal environment.

Keywords: Sexual Violence, Victims of Harrassment, Self-Silencing, Patriarchy

1. PENDAHULUAN

Isu kesetaraan gender tengah menjadi topik diskusi yang kembali ramai diangkat di Indonesia, selain karena pengesahan UU-TPKS (Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) yang menjadi landasan yang mengokohkan terhadap perjuangan penghapusan kekerasan seksual di Indonesia (Sinombor, 2022), juga karena tumbuhnya kesadaran generasi muda akan melanggengnya budaya patriarki di Indonesia dengan segala pengaruh positif dan negatifnya. Budaya patriarki menjadi salah satu budaya yang digunakan oleh banyak masyarakat di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Patriarki di Indonesia tidak berkembang sebagai budaya sendiri, namun memang sudah tercakup dalam budaya masyarakat, sehingga untuk mengurangi atau menghapuskan pola pikir patriarki yang terbentuk karena budaya akan menjadi suatu hal yang sulit dilakukan.

Ihsani (2021) menjelaskan bahwa sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat memunculkan masalah baru berupa kesenjangan serta ketidakadilan gender yang mempengaruhi sebagian besar aspek kehidupan manusia. Budaya patriarki memposisikan laki-laki sebagai pemilik kontrol utama masyarakat dan memiliki kekuasaan untuk melakukan apapun, sedangkan perempuan diposisikan sebagai kaum yang lemah dan memiliki sedikit pengaruh dalam masyarakat sehingga hal ini menyebabkan perempuan berada dalam posisi inferior. Hal ini memberikan

konstruksi serta pola pikir bahwa merupakan hal yang lumrah apabila ada laki-laki yang menggoda perempuan, sementara perempuan sebagai objek yang digoda dijadikan sebab dari kekerasan itu sendiri.

Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja, namun tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas korban dari kekerasan seksual adalah perempuan. Komnas Perempuan (2021) dalam CATAHU 2020 mendapati sebanyak 299.991 kasus kekerasan terhadap perempuan. Lebih spesifik lagi bentuk kekerasan yang terjadi adalah kekerasan seksual yang terjadi di Ranah Publik/Komunitas sebanyak 590 kasus (56%), salah satunya lingkungan perguruan tinggi/universitas. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang dicatat Ishak (2020), ditemukan terdapat 19% murid mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh para staf di perguruan tinggi tempat mereka menimba pendidikan, bahkan 75,9% menyebutkan bahwa bentuk pelecehan yang diterima terjadi sebanyak dua hingga tiga kali semenjak di perguruan tinggi dan setengah dari korban pelecehan seksual mendapatkan perlakuan tersebut dari para pengajar atau staf perguruan tinggi. Pelaku pelecehan seksual yang berasal dari staf atau pengajar perguruan tinggi terdiri atas 78% laki-laki, 15% perempuan, dan 7% lagi jenis kelamin tidak diketahui.

Perguruan tinggi yang seharusnya memberikan ruang aman bagi mahasiswa/i berubah menjadi tempat yang jauh dari kata aman, sebagai contoh pada kasus kekerasan seksual yang terjadi pada seorang mahasiswi angkatan 2018 di Universitas Riau yang dilecehkan oleh dosennya, sesudah kejadian pelecehan itu terjadi dan korban melapor kepada salah satu dosen jurusannya dan meminta menemaninya menemui ketua jurusan, dosen tersebut malah mengintimidasi korban (Setiawan, 2021). Korban diminta untuk tidak menceritakan kejadian itu kepada orang lain dan mengikhlaskan hal tersebut. Hal ini menjadi salah satu dari sekian banyak bukti bahwa korban kekerasan seksual mendapat viktimisasi lanjutan (ganda) ketika melaporkan kekerasan seksual yang ia alami, korban justru disalahkan dan dianggap ikut andil dalam kejadian tersebut sehingga korban cenderung menerima pelanggaran lanjutan terhadap hak-haknya dan/atau trauma tambahan (Soejoeti & Susanti, 2020a).

(Soejoeti & Susanti, 2020a) melihat institusi tidak memihak dan mendukung korban, dan cenderung lunak terhadap pelaku dalam penanganan kasus kekerasan seksual, seperti beberapa kasus yang telah dijelaskan diatas. Pelaku melakukan kekuatan fisik, paksaan, pelecehan, atau pembungkaman sebagai jenis kontrol sosial terhadap korban dan memanfaatkan aturan dan implementasi lapangan institusional yang terkesan mendukung aksi pelaku; penolakan yang ditunjukkan korban direspons dengan perilaku bermusuhan atau merugikan oleh institusi. Bentuk pelecehan seksual dan perilaku misogini juga dapat terwujud secara terbuka pada konteks kampus dalam diskusi, debat kelas, atau bahkan kurikulum akademik (Soejoeti & Susanti, 2020a).

Permasalahan yang meliputi kasus kekerasan seksual di kampus tidak dapat terus diabaikan karena lingkungan kampus diharapkan dapat membangun ruang ramah gender untuk mendukung aktivitas pembelajaran secara efektif. Pembungkaman kasus

kekerasan seksual di kampus yang dilakukan oleh korban karena berbagai alasan menjadi perhatian penting untuk merumuskan solusi yang tepat untuk mencegah, memproses, menyelesaikan, dan menanggulangi kasus kekerasan seksual di kampus. Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan membahas mengenai faktor-faktor yang melandasi korban kekerasan seksual di kampus dalam membentuk perilaku pembungkaman diri terhadap kejadian kekerasan seksual yang menyimpannya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Patriarki

Patriarki dalam definisi harfiah adalah kekuasaan bapak, yang berarti dalam lingkup keluarga dilindungi dan dipimpin oleh bapak. Jika definisi diperluas, kuasa ini dapat mencakup kelompok kecil yang dipimpin oleh laki-laki, dimana kepemimpinan laki-laki termasuk mengontrol kegiatan dan kehidupan anggotanya dan laki-laki dipandang sebagai pemimpin mutlak (K. W. Sari & Haryono, 2019). Budaya patriarki menurut (K. W. Sari & Haryono, 2019) adalah pola kekeluargaan yang berpusat pada garis keturunan bapak, sedangkan menurut Bressler (Apriliandra & Krisnani, 2021), patriarki adalah sistem sosial masyarakat yang berotasi pada laki-laki sebagai pusat dominasi dan memegang kewenangan pokok dalam tatanan masyarakat. Adapun, sistem patriarki memiliki definisi sebagai sistem dimana laki-laki lebih berkuasa dan mendominasi perempuan sehingga perempuan dilihat sebagai warga nomor dua atau pihak subordinat (Rohmatin, 2019).

Patriarki berkembang dari pembagian peran biologis dalam kebudayaan pra-modern antara laki-laki dan perempuan (K. W. Sari & Haryono, 2019), dimana laki-laki memiliki ukuran fisik yang dianggap sesuai untuk melakukan pekerjaan berat, seperti bercocok-tanam, mengangkut barang, dan membangun rumah; sedangkan perempuan dengan organ rahimnya dianggap lebih sesuai untuk mengasuh anak, dan mengurus rumah (Mulyani, 2018). Sehingga laki-laki dipandang sebagai pelindung dan penyedia kebutuhan hidup rumah tangga dan perempuan cukup mematuhi aturan rumah tangga yang telah ditetapkan oleh laki-laki. Kebudayaan patriarki ini bertahan lama hingga masa sekarang dan telah dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan diterima oleh masyarakat sehingga melahirkan konsep hegemoni, atau suatu relasi kuasa yang terjadi tanpa paksaan dan pihak yang dikuasai menerima ketimpangan kuasa dengan sukarela (Handayani & Novianto, 2004).

Sistem patriarki ini didasari oleh tiga asumsi yang dijabarkan Pyke (Darwin & Tukiran, 2001) sebagai berikut: (1) adanya kesepakatan sosial yang hanya menguntungkan sebagian kelompok namun dianggap mewakili kepentingan masyarakat; (2) terbentuknya ideologi hegemonis sehingga menjadi pola pikir sehari-hari dan dianggap sebagai sesuatu yang memang seharusnya berjalan seperti ini; (3) sistem dianggap sebagai penyokong kesatuan dan kerja sama sosial yang jika tidak dijalankan akan menimbulkan konflik masyarakat.

Budaya patriarki di Indonesia merupakan masalah struktural yang mempengaruhi individu, kelompok, dan masyarakat secara luas. Utamanya karena budaya patriarki telah berkembang menjadi ideologi hegemoni di Indonesia, terkhususnya di Jawa yang menganut paham patrilineal (Mulyani, 2018), perempuan menjadi pihak yang dimarginalisasi sehingga kerap mengalami kesulitan untuk mendapat akses yang sama terhadap hak-hak manusia dibanding laki-laki. Selain itu, karena perempuan di doktrinasi sebagai pihak inferior daripada laki-laki yang lebih dominan (Sakina & Siti, 2017), hal ini membawa banyak pengaruh pada cara hidup dan kepribadian perempuan. Perempuan sejak dini diajarkan untuk menjadi seseorang yang selalu mementingkan orang lain, terutama laki-laki, terlebih dulu dibanding dirinya. Perempuan dituntut untuk menjadi baik dan penurut, dengan cara menahan kebutuhan dan perasaannya serta mematuhi kata-kata dari laki-laki yang dianggap kedudukannya lebih tinggi dan tahu oleh masyarakat. Selain dituntut untuk mengikuti budaya patriarki masyarakat, perempuan juga dianggap sebagai orang yang inferior sehingga dianggap tidak penting dan diremehkan. Pengajaran dan pendoktrinasi inilah yang menjadi salah satu faktor yang melanggengkan praktik patriarki.

Budaya Jawa merupakan salah satu yang masih menganut budaya patriarkis. Pada keluarga, ayah berperan sebagai pencari nafkah dan kepala keluarga, serta ibu yang mengelola pekerjaan domestik. Struktur tersebut terbentuk dari proses historis (Sakti, 2021). Terdapat banyak istilah Jawa yang menekankan pada inferioritas perempuan dibanding laki-laki, yaitu *kanca wingking* untuk menyebut istri, yang berarti teman belakang secara harfiah atau teman yang mengurus urusan rumah tangga (Hermawati, 2007). Ada pula istilah *macak*, *manak*, dan *masak* yang disebut dalam *Serat Candrarini* yang berarti istri sepantasnya memberi keturunan untuk laki-laki, selalu berpenampilan cantik, dan memasak untuk suami (Endraswara, 2006; Hermawati, 2007). Serta istilah lain seperti *apur*, *pupur*, *kasur*, *sumur* dan mungkin masih banyak lagi istilah dengan akhiran “-ur-ur” yang melekat pada diri seorang perempuan atau istri (Hermawati, 2007).

Dalam budaya Jawa, perempuan yang ideal adalah perempuan yang memiliki sifat lemah lembut, penurut, dan tidak diperbolehkan untuk melampaui laki-laki. Sehingga kerap kali peran yang melekat pada perempuan ideal adalah mengelola rumah tangga, pendukung karir suami, istri yang patuh dengan suami dan ibu bagi anak-anaknya. Sementara laki-laki dicitrakan sebagai sosok yang “serba tahu”, sebagai panutan, berpikiran rasional dan agresif. Peran ideal laki-laki adalah sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah bagi keluarga, pelindung, dan pengayom (Hermawati, 2007).

Pembungkaman Diri

Pembungkaman diri merupakan teori yang dikembangkan oleh Dana C. Jack pada 1992 (Dana Crowley Jack & Dill, 1992). Teori ini muncul setelah adanya penelitian yang luas mengenai depresi, kepercayaan diri yang rendah, dan penilaian diri

yang negatif pada perempuan (Ahmed & Iqbal, 2019), terutama pengalaman mengenai hal yang mengarahkan perempuan untuk menderita depresi, yaitu pembungkaman diri sendiri. Perempuan mulai membungkam atau menahan pikiran, perasaan, dan perilaku tertentu yang dirasa akan berlawanan dengan keinginan orang lain. Mereka melakukan itu untuk menghindari konflik, menjaga sebuah hubungan, dan/atau menjamin keselamatan psikologis atau fisik mereka. Perilaku membungkam diri sendiri ini mengarah pada kehilangan diri dan perasaan tersesat dalam kehidupan perempuan, mereka juga merasakan perasaan malu, putus asa, dan kemarahan pada perasaan terjebak dan pengkhianatan diri (Dana C. Jack & Ali, 2010).

Teori pembungkaman diri Jack juga berdasar pada teori feminis dan teori psikodinamis, yang dilengkapi dengan teori depresi behavioral (Dana C. Jack & Ali, 2010). Meskipun pembungkaman diri yang dijabarkan terlihat sebagai hal yang privat dan personal, namun faktanya pembungkaman diri merupakan hal yang sangat kultural. Pembungkaman diri ditentukan oleh norma, nilai, dan gambaran pada masyarakat patriarkis akan perempuan yang “seharusnya”, yaitu menyenangkan, tidak egois, dan penyayang. Penilaian negatif perempuan kepada dirinya, kerap kali berpusat pada tindakan dan perasaan mereka pada suatu hubungan. Karena itu, pembungkaman diri kerap membuat perempuan mendahulukan kebutuhan orang lain dibanding dirinya, menutupi ekspresi diri, menahan kemarahan, menghambat perilaku yang berpusat pada diri, dan mengkritik diri yang berlawanan dari “perempuan yang baik” menurut budaya.

Pembungkaman diri menurut Dana Crowley Jack & Dill (1992) adalah kecenderungan perempuan untuk menyerah atau membungkam aspek berharga dari diri mereka untuk hubungan mereka, menekan tujuan, nilai, dan perasaan yang mungkin membuat mereka berkonflik dengan orang lain. Adapun pendapat lain mengenai pembungkaman diri menurut (Ahmed & Iqbal, 2019), yaitu sebuah praktik menahan ekspresi dari emosi, opini, kelebihan, dan kemampuan individu secara sukarela dan perilaku tersebut dilakukan dalam tekanan untuk menjaga hubungan dan memenuhi tanggung jawab dengan melampaui apa yang diperlukan untuk pilihannya sendiri. Ussher (Ussher, 2006; Ussher & Perz, 2010) memiliki pendapat lain mengenai pembungkaman diri, Ussher mendeskripsikan pembungkaman diri sebagai cara perempuan mengawasi respons, mengatur tindakan, serta merasa malu dan menyesal sehingga membungkam dirinya sendiri.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pembungkaman diri merupakan kecenderungan perilaku perempuan untuk menahan ekspresi diri berupa keinginan, kebutuhan, nilai, dan tujuan diri dengan tujuan menjaga hubungan interpersonal, menghindari konflik, dan mempertahankan keselamatan diri secara fisik dan/atau psikologis.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Metode penelitian dipilih untuk menggambarkan pengaruh patriarki budaya Jawa terhadap perempuan korban kekerasan seksual dalam kasus yang terjadi di kampus secara komprehensif. Penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena pengalaman subjek dan menafsirkan makna dalam peristiwa menggunakan metode ilmiah dianggap sesuai dengan penelitian ini (Usman & Akbar, 2009). Sedangkan, studi kepustakaan menurut Nazir (2013) adalah metode pengumpulan data dengan mengkaji data dari sumber tertulis seperti buku, literatur, catatan, dan laporan yang relevan dengan topik penelitian.

Data yang dikumpulkan kemudian dikaji dengan jenis *narrative review* untuk menjabarkan penjelasan mengenai topik penelitian secara sistematis. Peneliti melakukan pencarian literatur dalam negeri menggunakan basis data *Google Scholar* dengan kata kunci “Kekerasan Seksual di Kampus”, “Korban Kekerasan Seksual yang Bungkam”, dan “Patriarki Budaya Jawa” yang dirilis selama sepuluh tahun terakhir dari rentang tahun 2012 hingga 2021. Berdasarkan pencarian tersebut, terdapat ribuan jurnal yang muncul pada mesin pencarian. Lalu, peneliti menyeleksi jurnal melalui relevansi abstrak dan isi jurnal berdasarkan topik penelitian dan diperoleh 6 jurnal terkait yang dapat digunakan sebagai sumber penelitian

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian (Nikmatullah, 2020), kekerasan seksual dapat disebabkan oleh tiga hal yang merunut pada budaya patriarki, yaitu ketimpangan relasi gender, ketimpangan relasi kuasa, dan *rape culture*. Ketimpangan relasi gender terbentuk karena budaya patriarki masyarakat yang mengonstruksi peran gender, seringkali laki-laki dianggap sebagai pihak yang dominan terhadap perempuan, sehingga kebanyakan kasus pelecehan dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Selanjutnya, ketimpangan relasi kuasa menjelaskan kemungkinan individu yang memiliki kewenangan atau individu dominan untuk menggunakan kekuasaannya terhadap individu subordinat dan melakukan hal-hal yang melecehkan. Dalam ruang universitas, dosen atau civitas akademik dipandang memiliki kekuasaan terhadap mahasiswa, sehingga oknum civitas akademik memiliki kemungkinan untuk menyalahgunakan kuasa tersebut kepada mahasiswa dan melakukan kekerasan seksual. Terakhir, *rape culture* yang menganggap tubuh perempuan sebagai objek semata, sehingga melahirkan konsepsi yang misoginis, tubuh yang pantas dilecehkan, dan absen dalam pemberian hak dan perlindungan yang sesuai terhadap perempuan. *Rape culture* dilanggengkan oleh media dan budaya populer seperti *victim blaming*, lelucon seksis, dan toleransi terhadap kekerasan seksual sehingga memungkinkan meningkatnya kekerasan seksual.

Penelitian Soejoeti & Susanti (2020b) memaparkan bahwa penyebab utama kekerasan seksual di kampus terjadi karena hasil dari budaya patriarki yang mengakar di tengah masyarakat. Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian tersebut menyebutkan penyebab kekerasan seksual di kampus, yaitu: (1) adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antar gender yang didasarkan pada konstruksi sosial budaya patriarki; (2) pandangan seksualitas dilatarbelakangi oleh ketimpangan relasi kuasa antar gender; (3) masyarakat patriarkis yang membentuk relasi kuasa timpang antar gender; (4) sikap toleran pada kekerasan seksual yang dihasilkan dari diskriminasi gender.

Kompleksitas terkait penanganan kasus kekerasan seksual di kampus berkaitan dengan banyak hal, seperti peraturan mengenai mekanisme pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, sistem birokrasi, dan kualitas sumber daya manusia (Nikmatullah, 2020). Sistem birokrasi yang baik dan kondusif akan membentuk lingkungan yang mendukung kesetaraan gender, sedangkan sistem birokrasi yang kaku dan menyulitkan akan membuat kasus kekerasan seksual terbengkalai; begitupun dengan kualitas sumber daya manusia yang meliputi pengetahuan mengenai kekerasan seksual dan empati terhadap korban agar penanganan kasus terlaksana dengan objektif, setara, dan mengutamakan korban (Nikmatullah, 2020).

Dalam penelitiannya Nikmatullah (2020) juga menjelaskan alasan kenapa korban kekerasan seksual di kampus bungkam terhadap kasusnya, yaitu: (1) minimnya pengetahuan korban mengenai kekerasan seksual karena *rape culture* dalam lingkungan universitas, sehingga korban tidak mengetahui atau tidak yakin apakah dirinya menjadi korban kekerasan seksual; (2) korban mengalami trauma dan tekanan stigma dari lingkungan sehingga korban merasa lemah; (3) korban mendapat tekanan dan ancaman dari pelaku maupun institusi untuk tidak melaporkan kejadian kekerasan; (4) kampus tidak mengatur mekanisme pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual.

Adapun, Sari & Hadi (2018) dalam temuannya menyebutkan alasan para korban kekerasan seksual tidak melapor ke pihak yang berwajib adalah: (1) kejadian dianggap sebagai aib; (2) korban ragu ceritanya tidak dipercaya; (3) proses hukum yang tidak selesai; (4) takut adanya tekanan di masa depan; (5) tidak sadar bahwa dia adalah korban; (6) korban meremehkan pihak yang berwenang.

Ditambah lagi dengan penelitian Krebs et al., (2007) yang menjabarkan alasan kenapa kekerasan seksual di kampus menjadi tindak kriminal yang tidak dilaporkan oleh korban, yaitu: (1) tidak menyimpan bukti kekerasan seksual itu terjadi; (2) takut pelaku akan membalas dendam; (3) takut diperlakukan buruk oleh pihak berwenang; (4) pesimis laporannya tidak dianggap serius oleh pihak berwenang; (5) tidak ingin orang lain tahu kejadian tersebut; (6) tidak tahu cara melapor; (7) tidak yakin jika hal tersebut merupakan kejahatan; (8) tidak yakin akan ada tindak lanjut kepada pelaku; (9) tidak ingat atau tahu kejadian yang sebenarnya terjadi; (10) korban merasa dia pun memiliki andil atas kejadian tersebut.

Dampak negatif dari kejadian kekerasan seksual yang dialami korban bisa bermacam-macam, misalnya *post-traumatic disorder* dan/atau lebam tubuh, mengacaukan perasaan aman korban dan berdampak pada proses pengambilan keputusan korban dalam melaporkan kejadian kekerasan seksual kepada pihak yang berwenang (Trihastuti & Nuqul, 2020). Selain alasan-alasan yang telah dihimpun dari penelitian sebelumnya, korban yang sedang berada dalam kondisi yang tidak stabil secara fisik maupun psikologis, sehingga korban memiliki kecenderungan tinggi untuk bungkam terhadap kejadian kekerasan seksual yang dialaminya.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian diatas, dapat ditarik kesimpulan mengenai alasan-alasan korban kekerasan seksual di kampus tidak melaporkan kasus kepada pihak yang berwenang, yaitu: (1) korban tidak sadar bahwa kejadian tersebut adalah kekerasan seksual karena itu merasa bahwa dirinya bukan korban; (2) malu dan takut akan kejadian tersebut dan jika orang lain tahu; (3) tidak tahu cara melapor dan ketidakpercayaan pada pihak berwenang; (4) trauma terhadap kejadian.

Ketidaksadaran korban akan dirinya yang telah menjadi korban kekerasan seksual dapat dijelaskan melalui budaya *rape culture* yang berakar dari budaya patriarki. *Rape culture* merupakan gagasan dalam masyarakat yang melihat kekerasan seksual sebagai sesuatu yang lumrah, menerimanya, menoleransinya, bahkan hingga memaafkan kejadian tersebut, sehingga kekerasan seksual tersebut disepelekan (Kessel, 2021). Selain menyepelkan kekerasan seksual, perilaku menyalahkan korban (*victim blaming*), *slut-shaming*, dan objektifikasi seksual juga termasuk kedalam *rape culture*. Budaya ini terbentuk dari budaya patriarki yang mendukung agresi seksual laki-laki dan mendorong kekerasan terhadap perempuan (Kessel, 2021).

Budaya patriarki yang kental dalam masyarakat Jawa membentuk sikap permisif terhadap kekerasan seksual sehingga korban seringkali tidak mendapat pengetahuan yang cukup mengenai seksualitas dan tidak sadar jika dirinya sudah menjadi korban kekerasan seksual. Budaya patriarki juga membangun pembenaran akan kekerasan terhadap perempuan sehingga kejadian kekerasan seksual diterima masyarakat sebagai sesuatu yang wajar dan bahkan melimpahkan kesalahan kepada korban sehingga muncullah perilaku *victim blaming* (Soejoeti & Susanti, 2020b). Melihat masalah-masalah yang berfokus pada diskriminasi perempuan yang bercabang dari budaya patriarki, tidak heran jika perempuan akhirnya mengembangkan perilaku pembungkaman diri untuk menjaga hubungan interpersonal, menghindari konflik, dan mempertahankan keselamatan diri secara fisik dan/atau psikologis. Perilaku pembungkaman diri hadir sebagai salah satu cara bagi perempuan untuk menjaga diri di lingkungan patriarkis.

5. PENUTUP

Pembungkaman diri dan keengganan korban kekerasan seksual dalam melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwenang berdasar pada budaya patriarki

dalam masyarakat Jawa yang mengakar kuat. Citra perempuan sebagai seorang yang penurut, inferior, dan lemah dijadikan hal yang lumrah bagi mereka untuk diposisikan lebih rendah daripada laki-laki dan diperlakukan remeh sehingga ini membentuk konstruksi serta pola pikir bahwa perempuan merupakan objek seksual dan menjadikan hal tersebut sebab dari kekerasan itu sendiri. Ruang publik, dalam hal ini adalah lingkungan kampus, menjadi salah satu tempat dimana kekerasan seksual ini berlangsung. Namun banyak kasus kekerasan seksual yang berlangsung didalamnya tidak diketahui publik. Hal ini dikonfirmasi dari berbagai penelitian yang memaparkan mengenai alasan-alasan korban kekerasan seksual di kampus tidak melaporkan kasusnya, yaitu korban tidak sadar bahwa kejadian tersebut adalah kekerasan seksual karena itu merasa bahwa dirinya bukan korban; malu dan takut akan kejadian tersebut dan jika orang lain tahu; tidak tahu cara melapor dan ketidakpercayaan pada pihak berwenang; serta trauma terhadap kejadian dan kesulitan dalam membuat keputusan untuk melapor karena sedang tidak stabil secara fisik dan psikologis. Korban menjadi pihak malang yang menerima dampak dari kejadian kekerasan seksual itu dan konsekuensi budaya patriarki pada masyarakat, sebab budaya patriarki melegitimasi kekerasan terhadap perempuan dan menimbulkan konsep *rape culture* yang menoleransi pelecehan perempuan. Korban pun cenderung melakukan pembungkaman diri untuk menjaga hubungan interpersonal, menghindari konflik, dan mempertahankan keselamatan diri secara fisik dan/atau psikologis sebagai cara menjaga diri dalam lingkungan patriarkis.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, F., & Iqbal, H. (2019). Self-Silencing and Marital Adjustment in Women With and Without Depression | Pakistan Journal of Psychological Research. *Pakistan Journal of Psychological Research*, 34(2). <https://doi.org/10.33824/PJPR.2019.34.2.17>
- Apriliandra, S., & Krisnani, H. (2021). Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31968>
- Darwin, M., & Tukiran, D. (2001). *Menggugat Budaya Patriarkhi*. Kerjasama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.
- Endraswara, S. (2006). *Rasa sejati : misteri seks dunia kejawaen*. Narasi.
- Handayani, C. S., & Novianto, A. (2004). *Kuasa wanita Jawa*. PT LKiS Pelangi Aksara. https://books.google.com/books/about/Kuasa_Wanita_Jawa.html?id=hGVoDwAAQBAJ
- Hermawati, T. (2007). Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender. *Jurnal Komunikasi Massa*,

-
- 1(1), 18–24. <https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2010.01600.x>
- Ihsani, S. N. (2021). Kekerasan Berbasis Gender dalam Victim-Blaming pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media Online. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2(1), 12–21. <https://doi.org/10.22146/jwk.2239>
- Ishak, D. (2020). ARTIKEL PELECEHAN SEKSUAL DI INSTITUSI PENDIDIKAN : SEBUAH. *Akselerasi*, 2(2), 136–144. <https://doi.org/10.54783/jin.v2i2.462>
- Jack, Dana C., & Ali, A. (2010). Silencing the Self Across Cultures: Depression and Gender in the Social World. In *Silencing the Self Across Cultures: Depression and Gender in the Social World*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/ACPROF:OSO/9780195398090.001.0001>
- Jack, Dana Crowley, & Dill, D. (1992). The silencing the self scale. *Psychology of Women*, 16, 97–106.
- Kessel, A. (2021). Rethinking Rape Culture: Revelations of Intersectional Analysis. *American Political Science Review*, 1–13. <https://doi.org/10.1017/S0003055421000733>
- Komnas Perempuan. (2021, March 5). *CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci*. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>
- Krebs, C. P., Lindquist, C. H., Warner, T. D., Fisher, B. S., & Martin, S. L. (2007). *The Campus Sexual Assault (CSA) Study The Campus Sexual Assault (CSA) Study Final Report*. vii-7–1. <https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/221153.pdf>
- Mulyani, T. (2018). Kajian Sosiologis mengenai Perubahan Paradigma dalam Budaya Patriarki untuk Mencapai Keadilan Gender. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 3(02), 149–158. <https://doi.org/10.25170/PARADIGMA.V3I02.1935>
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian* (R. Sikumbang (ed.); 8th ed.). Ghalia Indonesia.
- Nikmatullah. (2020). Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 14(2), 37–53. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2875>
- Rohmatin, F. (2019). Dekonstruksi Wacana Patriarki dan Kebungkaman Perempuan dalam Manuskrip Hikayat Darma Tasiyah. *Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara*, 10(2), 149–162. <https://doi.org/10.37014/JUMANTARA.V10I2.598>
- Sakina, A. I., & Siti, D. H. (2017). MENYOROTI BUDAYA PATRIARKI DI INDONESIA. *Share : Social Work Journal*, 7(1), 71–80.

<https://doi.org/10.24198/SHARE.V7I1.13820>

Sakti, R. E. (2021). *Njawani : bagaimana keluarga Jawa menciptakan anak-anak yang patuh.*

Sari, K. W., & Haryono, C. G. (2019). HEGEMONI BUDAYA PATRIARKI PADA FILM (Analisis Naratif Tzvetan Todorov Terhadap Film Kartini 2017). *SEMIOTIKA: Jurnal Komunikasi*, 12(1).
<https://doi.org/10.30813/S:JK.V12I1.1542>

Sari, N. A., & Hadi, A. (2018). Kajian Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Tempat Umum (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polsek Syiah Kuala) | Sari | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(4), 746–758.
<http://www.jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/14615>

Setiawan, R. (2021, November 8). *Kekerasan Seksual di Kampus Masif, Permendikbud PPKS Jadi Solusi?* https://tirto.id/kekerasan-seksual-di-kampus-masif-permendikbud-ppks-jadi-solusi-gk6z?utm_source=Tirtoid&utm_medium=Terkait

Sinombor, S. H. (2022, April 13). *UU TPKS Disahkan, Tonggak Awal Penghapusan Kekerasan Seksual - Kompas.id.*
<https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/04/12/uu-tpks-disahkan-perjuangan-untuk-korban-masih-panjang>

Soejoeti, A. H., & Susanti, V. (2020a). Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus. *Deviance: Jurnal Kriminologi*, 4(1), 67–83.

Soejoeti, A. H., & Susanti, V. (2020b). Memahami Kekerasan Seksual dalam Menara Gading di Indonesia. *Community : Pengawas Dinamika Sosial*, 6(2), 207–221.
<https://doi.org/10.35308/JCPDS.V6I2.2221>

Trihastuti, A., & Nuqul, F. L. (2020). Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual. *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi*, 11(1), 1–15.
<https://doi.org/10.21107/PERSONIFIKASI.V11I1.7299>

Usman, H., & Akbar, P. S. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial* (2nd ed.). Bumi Aksara.

Ussher, J. M. (2006). *Managing the monstrous feminine : regulating the reproductive body* (1st ed.). <https://www.routledge.com/Managing-the-Monstrous-Feminine-Regulating-the-Reproductive-Body/Ussher/p/book/9780415328111>

Ussher, J. M., & Perz, J. (2010). Disruption of the Silenced Self: The Case of

Premenstrual Syndrome. *Silencing the Self Across Cultures: Depression and Gender in the Social World.*

<https://doi.org/10.1093/ACPROF:OSO/9780195398090.003.0022>